

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBELAJARAN DEMOKRASI: KEPENTINGAN UNTUK PARTISIPASI POLITIK ANAK MUDA

Syahrur Razy¹

¹Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

²razysyahrur@gmail.com

ABSTRAK

Proses kegiatan politik terjadi di kehidupan sehari-hari dan di semua bidang sosial. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berdasarkan fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Orang-orang, terutama anak muda, selalu melihat politik sebagai proses yang rumit. Seringkali, warga yang tertarik secara politik dan termotivasi dihadapkan dengan konsep 'demokrasi', 'politik' dan 'pemilu demokratis' di berbagai surat kabar atau di berita TV. Selain itu, ada perdebatan sengit tentang defisit demokrasi, dan peningkatan ekstremisme dikhawatirkan jika Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterima kaum muda tidak ditingkatkan. Untuk alasan ini, kami bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tentang politik secara efektif disediakan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan untuk menunjukkan dampak komitmen politik terhadap kaum muda dengan mendiskusikan konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, belajar demokrasi dan partisipasi politik.

Kata kunci : *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, politik, demokrasi dan partisipasi*

PENDAHULUAN

Kegiatan politik dialami setiap hari dan di semua bidang sosial. Politik dialami oleh individu, di atas segalanya, oleh orang muda sebagai proses yang kompleks. Seringkali, warga negara yang tertarik secara politik dihadapkan dengan gagasan 'demokrasi', 'politik' atau 'pemilu demokratis' di surat kabar dan berita televisi. Selain itu, defisit demokrasi sering didiskusikan, dan kebangkitan ekstremisme dikhawatirkan jika Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pemuda tidak ditingkatkan. Meskipun ada kritik bahwa proses pengambilan keputusan demokratis lambat dan bahwa keterlibatan dalam politik mengungkap titik lemah, partisipasi politik publik adalah prinsip dasar demokrasi dan dianggap sebagai jantung

pertimbangan politik (Frevel, 2009: 7). Diskusi baru dan intensif tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berjalan selama bertahun-tahun, seperti pendidikan orang dewasa di masyarakat bersama dengan pengembangan profesional. Asumsinya adalah bahwa orang harus diajarkan tentang "politik", dan mereka harus mampu menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Beer, Cremer dan Massing, 1999: 11-12). Setiap warga negara berhak untuk menilai masalah sosial dan politik secara berbeda dan, pada saat yang sama, untuk mempengaruhi penilaian orang lain dengan penilaian dan perilakunya sendiri. Selain partisipasi pemilih, partisipasi dalam protes, keanggotaan dalam partai politik, asosiasi dan klub, sejumlah besar kemungkinan untuk partisipasi politik dalam masyarakat modern dipengaruhi oleh sarana media massa (Rhombert, 2009: 145). Citra politik dan penilaian warga tergantung pada informasi dari media (Plasser, 2006: 525). Media memainkan peran penting dalam menanamkan pengetahuan tentang politik. Alasannya adalah bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan pemahaman demokrasi memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan fokus pada politik (Rhombert, 2009: 161).

Partisipasi warga tampaknya memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan urusan publik dalam mengembangkan keyakinan bahwa keterlibatan publik akan menghasilkan preferensi publik yang lebih banyak (Rusnaini, 2016: 805). Tetapi pada akhir abad ke-20 dan pada awal abad ke-21, penurunan kepercayaan diri yang cepat dalam lembaga-lembaga politik dan dalam sistem politik telah didaftarkan (Ozlem, 2015: 545). Jumlah non-pemilih meningkat, dan fenomena ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap politik meningkat. Untuk alasan ini, saya bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan politik secara efektif disediakan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami bermaksud untuk menunjukkan dampak diskusi tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, belajar demokrasi dan partisipasi politik dapat memiliki komitmen politik kaum muda. Titik awal untuk topik ini adalah jarak kebijakan kaum muda karena studi yang berbeda mengungkapkan bahwa kaum muda

menunjukkan sedikit minat dalam politik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sungguh luar biasa bahwa kaum muda menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik pada politik dan merasa bahwa banyak politisi dan, khususnya, partai-partai politik telah gagal dalam memenuhi kebutuhan kaum muda. Memang, situasi serius semacam itu seharusnya benar-benar menantang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memicu minat politik di kalangan anak muda di kelas dan di luar sekolah.

METODE PENELITIAN

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Program Studi Pascasarjana PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta pada dasarnya mahasiswa di Universitas tersebut merupakan kaum muda yang menjadi pemilih muda dalam proses demokrasi dan mengikuti partisipasi demokrasi di Indonesia. Berdasarkan wawancara dan studi dokumen yang ada. Waktu penelitian adalah Bulan Juni 2018.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan hasil penelitian ini memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga atau yang lainnya) yang berdasarkan fakta. H. B Sutopo (2002: 110) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian tingkat kedua yang merupakan pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif, peneliti sudah mengetahui variabel yang terlibat dalam sasaran studinya”. Huberman dalam Herdiansyah (2010: 164-181) terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu: “tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data, tahapan kedua adalah tahap reduksi data, tahapan ketiga adalah tahap display data, dan tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pembelajaran Demokrasi

Apa arti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Apa fokus utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Wolfgang Sander menekankan bahwa gagasan " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan " sebagai istilah

umum untuk pembelajaran politik yang disengaja dalam lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan dan tidak terbatas pada bentuk-bentuk pembelajaran politik (Sander, 2002: 12). Meskipun tidak ada definisi substansial dan diterima secara umum tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam ilmu politik, gagasan ini harus digambarkan dari konsep sosialisasi politik, pendidikan sosial dan sipil (Massing, 1999: 27; Detjen, 2007: 3).

- a. **Sosialisasi Politik:** Konsep sosialisasi politik adalah istilah umum untuk pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan. Menurut Buhl, mendidik orang muda untuk menjadi anggota masyarakat, yang secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan lingkungan politik merupakan langkah penting dalam konteks sosialisasi politik (Buhl, 2003: 16). Dalam konteks ini, upaya untuk membawa generasi yang sedang tumbuh dalam hubungan dengan politik adalah tugas utama pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan, yang didefinisikan sebagai 'sosialisasi politik yang dimaksudkan'. Sosialisasi politik fungsional membentuk pandangan dunia politik tentang seorang individu. Orang-orang yang meningkatkan kesadaran pada orang muda tentang proses politik termasuk keluarga, tetangga, kelompok sebaya, media, militer, tempat kerja dan sekolah sebagai institusi yang menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Melalui kolaborasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik di sekolah-sekolah, seperti surat kabar siswa atau pemilihan perwakilan dewan siswa, remaja mendapatkan wawasan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi liberal, yang dapat menyebabkan lebih banyak motivasi dan kemauan di pihak mereka untuk terlibat dalam politik di dalam dan di luar sekolah (Detjen, 2007: 3; Hellmuth dan Klepp, 2010: 91).
- b. **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan:** Pendidikan berarti peradaban manusia dan bertujuan untuk memengaruhi perilaku individu (Detjen, 2007: 3). Tetapi dalam perjalanan industrialisasi, urbanisasi dan mobilisasi politik, diferensiasi dan pelebagaan pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan telah

terjadi. Perubahan sosial dan keputusan politik, tuntutan stabilitas dalam struktur sosial dan politik, dan legitimasi oleh warga mengarah pada munculnya dan pelebagaan pendidikan dan pelatihan sipil yang independen. Ini berarti bahwa dalam perubahan sistem atau perubahan sosial, konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi lebih penting. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terutama berorientasi pada sistem dan berorientasi pada stabilitas (Massing, 1999: 29).

- c. Pendidikan Sosial: Sebagai sub bidang pedagogi, pendidikan sosial juga mencakup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini adalah upaya yang ditargetkan yang dibuat oleh orang yang dipercaya dengan pendidikan. Salah satu aspek utama dari pendidikan sosial adalah untuk mempromosikan sikap sosial dasar. Ini termasuk kemampuan untuk empati, kerjasama, kesetiaan, solidaritas, dan toleransi. Sikap sosial dasar digunakan dalam penilaian rasional atas kondisi dan masalah sosial. Baru-baru ini, konsep ini dikalahkan oleh konsep pembelajaran sosial. Konsep pembelajaran sosial mengacu pada belajar mandiri dalam interaksi sosial dan sosialisasi interaksi (Detjen, 2007: 4).

B. Tujuan Utama dan Tugas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bagian lintas bagian pendidikan yang independen yang berbeda dari tugas konseptual dan kelembagaan (Sander, 2002: 11). Tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk mendorong kemampuan dan kemauan partisipasi politik dengan memberikan informasi dan dasar untuk membuat penilaian yang teliti, yang dicirikan sebagai "rasionalitas politik" menurut Bernhard Sutor (Kuhn dan Massing, 1990: 285). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai prasyarat tindakan rasional dan manusiawi harus berkontribusi pada demokratisasi masyarakat dan emansipasi individu (Kuhn dan Massing, 1990: 282). Pengetahuan tentang politik, kesadaran politik dan partisipasi politik dapat

dilihat sebagai tujuan utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam demokrasi modern.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus memenuhi tujuan kematangan dan kemandirian politik warga negara dalam sistem demokrasi. Ketika datang ke pendidikan di sekolah, empat kelompok warga perlu dipertimbangkan. Pertama, kelompok apatis terdiri dari orang-orang yang jarang berurusan dengan politik atau sangat jarang memberikan suara mereka dalam pemilihan. Mereka mungkin dilihat sebagai tantangan untuk pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan. Kedua, orang-orang yang terinformasi dan bijaksana yang sangat tertarik dengan politik. Mereka memiliki informasi yang baik tentang kehidupan politik dan tidak mudah dimanipulasi. Di luar pemilihan dan pemungutan suara, mereka tidak menunjukkan keterlibatan aktif dalam politik. Ketiga, warga yang aktif memiliki pengetahuan tentang peluang untuk partisipasi politik dan mampu penilaian politik yang rasional. Kelompok terakhir terdiri dari warga yang aktif terlibat dalam politik. Mereka memegang keanggotaan partai, berpartisipasi dalam partai politik, kelompok kepentingan, atau kelompok aksi. Pada titik ini, diyakini bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam kesediaan (Massing, 2002: 36).

Dimensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Peter Filzmaier (2007) membedakan tiga dimensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan:

- a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai penerus pengetahuan: Tidak hanya terkait dengan transfer pengetahuan faktual, tetapi juga dengan pemahaman koherensi pragmatis
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai kebebasan berekspresi dan promosi untuk partisipasi: Harus "mendukung pengembangan sikap politik, pendapat, dan nilai-nilai." Budaya politik adalah konsensus dasar untuk keberadaan dan kualitas demokrasi, yang termasuk "minat dalam masalah sosial dan politik".

- c. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai kompetensi sosial: Hanya efektif dengan interaksi pengetahuan teoritis; itu termasuk kesiapan untuk menerima tanggung jawab, untuk mengembangkan penilaian dan untuk memilih opsi kebijakan yang telah ditetapkan atau dikembangkan.

Untuk meringkas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bekerja pada menyelaraskan individu untuk menemukan jalan ke gejolak politik, ekonomi dan sosial dari kehidupan politik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah alat untuk pertahanan dan pengembangan demokrasi. Terutama di masa globalisasi maju, keuntungan pendidikan sipil menjadi penting. Partisipasi budaya politik demokratis, serta mediasi antara individu, lembaga dan organisasi sosial adalah penugasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Beer, Cremer dan Massing, 1999: 13-14).

Diskusi tentang Pembelajaran Demokrasi

Ada berbagai perdebatan dan pertanyaan tentang belajar demokrasi yang dapat dijawab dalam hal filsafat. Mempelajari demokrasi berfokus pada dukungan dan partisipasi dari orang yang aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Pendekatan demokrasi pembelajaran adalah hubungan erat antara demokrasi dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah kebutuhan demokrasi di masa depan dan hanya bisa efektif dalam sistem demokrasi (Massing, 2002: 161). Gerhard Himmelman memperluas pendekatan dan mendefinisikan politik pembelajaran sebagai pembelajaran demokrasi. Kata ‘politik’ dianggap oleh orang muda sebagai ‘bisnis kotor’ sehingga gagasan demokrasi mungkin mendapatkan simpati. Dengan demikian, ia menggabungkan gagasan demokrasi dengan gaya hidup, sistem sosial dan bentuk aturan. Dan dari perpecahan tiga arah ini, ia melangkah lebih jauh dan mendefinisikan tugas-tugas dan tujuan spesifik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Massing, 2002: 167-169). Singkatnya, konsep belajar demokrasi berarti memahami fungsi, nilai dan isi demokrasi. Oleh karena itu, para siswa dapat mengalami demokrasi dan politik melalui pengalaman dan

tindakan serta pemahaman mereka sendiri dan, sebagai hasilnya, mengembangkan beberapa kemampuan ketika memahami pemahaman demokrasi (Henkenborg, 2009: 284-288).

C. Partisipasi Politik

Dalam demokrasi perwakilan, bentuk pemerintahan mendapatkan kekuatannya dari partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik (Meyer, 2009: 133). Jika warga menghindari politik, sistem sosial akan kehilangan fungsi legitimasinya. Bentuk-bentuk partisipasi politik bermacam-macam dan menempatkan tuntutan yang berbeda pada warga negara. Kami berbicara tentang partisipasi, pertimbangan nilai dan penegakan minat. Contoh partisipasi politik adalah pemilihan umum, kegiatan partai, referendum, pemogokan atau inisiatif warga negara (Schultze, 2007: 398). Secara khusus, kaum muda diminta untuk berkontribusi pada politik dan untuk mendamaikan kepentingan. Dengan demikian, jelas bahwa kaum muda yang aktif dalam politik harus memiliki keterampilan komunikatif dasar untuk melihat aturan dan nilai lebih mudah (Burdewick, 2003: 37).

Dalam konteks perdebatan politik tentang apatisisme politik anak muda, muncul pertanyaan tentang partisipasi politik anak muda dan pemahaman mereka tentang pertanyaan kebijakan. Diskusi tentang partisipasi ditinjau di media, terutama, jika pada hari pemilihan, anak-anak muda menghindari kotak suara atau tidak menunjukkan minat dalam politik, yang dianggap sebagai gejala krisis demokrasi dan kurangnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada titik ini, perlu untuk memotivasi anak-anak dan remaja untuk menjadi aktif secara politik. Sekolah, keluarga dan teman-teman adalah faktor penting ketika menjelaskan perilaku politik. Kelompok-kelompok sejawat ini dapat mendorong kaum muda untuk menunjukkan minat yang besar dalam politik, dengan demikian meningkatkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi secara politik baik di dalam

maupun di luar sekolah (Schwarzer dan Zeglovits, 2009: 327). Juga masuk akal untuk mengasumsikan bahwa partisipasi politik kaum muda bergantung pada status sosial-ekonomi (Schultze, 2007: 399).

Dalam kerangka partisipasi politik, meringkas temuan dalam model yang menjelaskan partisipasi sukarela warga negara dalam sistem politik. Model ini mengandung tiga faktor penjelas yang secara positif mempengaruhi partisipasi politik. Sumber daya yang tersedia secara individu seperti waktu dan uang dapat membantu bagaimana warga berpartisipasi dalam politik. Keterlibatan politik, seperti kepentingan politik dan kesadaran politik dapat diklasifikasikan sebagai faktor penjelas kedua. Integrasi ke dalam jejaring sosial adalah faktor penjelas ketiga. Ini menentukan apakah warga dihadapkan dengan rincian peluang partisipasi (Perlot dan Zandonella, 2009: 427).

Untuk mengatakan kaum muda tidak tertarik pada politik dan kurangnya informasi tentang politik adalah generalisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda, tampak bahwa meskipun budaya politik yang berbeda, pergi ke tempat pemungutan suara dianggap sebagai tugas warga negara. Ini juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak menimbulkan keributan besar dan membutuhkan sedikit informasi (Deneve, 2009: 155). Namun demikian, konsumsi media memiliki pengaruh khusus pada kemauan politik partisipasi. Suplai informasi di media dapat membuat orang muda menjadi kacau. Mereka dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa dunia yang kritis dan tidak dapat mengklasifikasikan atau menanganinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka merasa kewalahan dan dapat dengan mudah melepaskan diri dari politik (Bohmer, 2002: 37–38). Memproses informasi ke dalam pengetahuan adalah dasar untuk aksi sosial dan partisipasi politik. Pada titik ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diperkenalkan yang harus menyampaikan penggambaran media tentang politik. Tetapi pengetahuan macam apa dan kemampuan apa yang perlu warga negara untuk dimasukkan dalam sistem politik?.

Kata "pengetahuan" yang bertentangan dengan ketidaktahuan atau menentang informasi menunjukkan hubungan yang secara sosial divalidasi dari sistem psikologis dan lingkungannya. Dalam sains, pengetahuan diuji pada kebohongan yang mungkin terjadi. Dalam sistem pendidikan, pengetahuan diestimasi sebagai pengetahuan individu, yang berarti bahwa ia mewakili suatu bentuk *curriculum vitae*. Dalam konteks ini, media massa berfungsi sebagai transfer pengetahuan untuk memahami informasi (Luhmann, 2002: 98). Atas dasar pengetahuan, peluang lain dapat dicapai yang memberikan arah yang berorientasi pada tujuan dimasa depan (Luhmann, 2002: 97).

Untuk menjalankan peran berbeda sebagai warga negara, Anda membutuhkan kemampuan. Tujuan utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah membekali siswa dengan pengetahuan politik. Jika Anda dihadapkan dengan masalah atau masalah politik, Anda harus kembali pada pengetahuan yang relevan. Di sini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan didefinisikan sebagai "pengetahuan kerja"; itu terkait dengan sebab-sebab dan memiliki 'karakterinstrumental'. Kemampuan mengharapakan pengetahuan kerja yang diperlukan untuk analisis mata pelajaran khusus. Bagian dari pengetahuan yang mengalir ke keahlian dan berkontribusi pada pengembangan konsep dan pemahaman kategori politik (Krammer, 2009: 19). Dengan demikian konsep kompetensi mengacu pada 'apa', berdasarkan mana harapan sosial atau kebijakan yang ditetapkan (Moegling, 2008: 29).

D. Konsep dan Peluang Baru dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Untuk budaya yang luas, jangka panjang dan alami dari partisipasi politik oleh orang-orang muda, proyek-proyek yang berbeda diselenggarakan untuk memicu minat kaum muda untuk politik dan untuk memperkuat kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Proyek dan inisiatif tersebut di bidang pendidikan dan partisipasi sipil yang telah dimulai akan ditunjukkan dengan contoh-contoh. Di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mempromosikan pendidikan politik

demokratis melalui kegiatan pendidikan di sekolah ataupun universitas dan untuk mendorong orang-orang yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kebijakan pendidikan. (Kordik, 2008: 806). Alasan untuk peluncuran kampanye "Pemuda dalam Aksi" adalah untuk meningkatkan jumlah pemilih yang rendah dan kurangnya partisipasi pada orang-orang muda dalam kehidupan publik dan politik. Langkah penting dalam mempromosikan partisipasi kaum muda. Topik strategi adalah Pendidikan dan pelatihan, pekerjaan dan kewirausahaan, komitmen relawan, kesehatan dan kesejahteraan, pemuda di dunia, kreativitas dan budaya, pendidikan non-formal, partisipasi oleh orang muda dan integrasi sosial. Dengan proyek ini, "Pemuda dalam Aksi" memberikan kontribusi yang tinggi terhadap partisipasi kaum muda karena mendorong kaum muda untuk terlibat secara politik dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Seperti telah disebutkan sebelumnya, tujuan utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk mendidik siswa agar menjadi warga yang dewasa dan cakap. Pada akhirnya, masyarakat demokratis bergantung pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan komitmen politik. Jelas bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam budaya politik demokrasi modern. Pada titik ini, lembaga universitas masuk ke dalam bentuk yang bertanggung jawab untuk mengajarkan politik mahasiswa dan memberdayakan mereka untuk menjadi warga negara yang kritis dan sadar dengan penilaian mereka sendiri mengenai partisipasi politik. Namun, mengingat minat dalam partisipasi politik, media massa adalah hubungan penting antara partisipasi dan politik karena orang muda belajar politik melalui media. Diskusi politik dan percakapan dengan keluarga, teman atau di sekolah dapat mempengaruhi pengetahuan dan keterlibatan politik dengan cara yang positif.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan tetap menjadi subyek penyelidikan empiris di masa depan karena berulang kali dihadapkan dengan

tantangan baru untuk mengelola risiko utama dari sistem hukum demokratis. Partisipasi pemilih yang rendah atau meningkatnya ketidaktertarikan dalam politik oleh orang-orang muda memaksa para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan peran sentral Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam demokrasi dan untuk membuat saran untuk meningkatkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tidak ada keraguan bahwa subjek Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak cukup untuk menyampaikan informasi murni tentang hak dan kewajiban dalam demokrasi dan untuk memotivasi kaum muda secara politik. Mendapatkan pengalaman dalam lingkungan sosial dan pengalaman aktif dengan demokrasi dapat secara signifikan meningkatkan komitmen politik kaum muda. Partisipasi politik kaum muda dan pembuatan kebijakan yang wajar di semua bidang yang mempengaruhi kaum muda membentuk masa depan. Dengan situasi ini, para politisi diundang untuk memahami kepentingan, kebutuhan, dan keinginan kaum muda yang salah satunya adalah mahasiswa untuk melawan kekecewaan terkait dengan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Beer, Wolfgang/Cremer, Will/Massing, Peter. 1999. *Handbuch politische Erwachsenenbildung*. Schwalbach: Wochenschau Verlag.
- Buhl, Monika. 2003. *Jugend, Familie, Politik. Familiäre Bedingungen und politische Orientierungen im Jugendalter*. Opladen: Leske und Budrich.
- Burdewick, Ingrid. 2003. *Jugend – Politik – Anerkennung. Eine qualitative empirische Studie zur politischen Partizipation 11- bis 18-Jähriger*. Opladen: Leske und Budrich.
- Deneve, Dorothee . 2009. *NichtwählerInnen – eine Gefahr für die Demokratie? Opladen, Farmington*. Hills: Verlag Barbara Budrich.
- Detjen, Joachim. 2007. *Politische Bildung. Geschichte und Gegenwart in Deutschland. München*. Wien: Oldenbourg.
- Filzmaier, Peter. 2007. *Politische Bildung: Was ist das 2007*. In: <http://science.orf.at/science/filzmaier/73825> (Stand: 5. 2. 2009). Di akses 28 Juni 2018.
- Frevel, Bernhard. 2009. *Demokratie. Entwicklung – Gestaltung – Problematisierung*. Wiesbaden: VS Verlag.

- Henkenborg, Peter. 2009. *Demokratie-Lernen – eine Philosophie der politischen Bildung*. In: *Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 2009/3 Vierteljahresschrift*, 38. Jahrgang, Wien: Facultas Verlag.
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kordik, Egon. 2008. *Schulwesen im Europarat*. In: *Hummer Waldemar: Österreich im Europarat 1956–2006. Bilanz einer 50-jährigen Mitgliedschaft*. Wien: Böhlau Verlag.
- Kuhn, Hans-Werner/Massing, Peter. 1990. *Politische Bildung in Deutschland. Entwicklung – Stand – Perspektiven*. Opladen: Leske und Budrich.
- Luhmann, Niklas. 2002. *Das Erziehungssystem der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag.
- Massing, Peter. 1999. *Theoretische und normative Grundlagen politischer Bildung*. In: *Beer, Wolfgang et al. (Hrsg.): Handbuch politische Erwachsenenbildung*. Schwalbach: Wochenschau Verlag.
- Perlot, Flooh/Zandonella, Martina. 2009. *Wahlen mit 16 – Jugendliche und Politik in Österreich*. In: *SWS Rundschau Heft 4/2009*. Jahrgang. Wien: Facultas Verlag.
- Plasser, Fritz. 2006. *Massenmedien und politische Kommunikation* In: *Dachs, Herbert et al. (Hrsg.): Politik in Österreich. Das Handbuch*. Wien: Manz Verlag.
- Rhomberg, Markus. 2009. *Politische Kommunikation*. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.
- Rusnaini. 2016. *Citizen Participation in Medium-Term Local Development Plan in Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sander, Wolfgang. 2002. *Von der Volksbelehrung zur modernen Profession. Zur Geschichte der politischen Bildung zwischen Ideologie und Wissenschaft*. In: *Butterwege, Christoph/Hentges, Gudrun (Hrsg.): Politische Bildung und Globalisierung*. Opladen: VS Verlag.
- Schultze, Rainer-Olaf. 2007. *Partizipation*. In: *Nohlen, Dietrich/Grotz, Florian (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik*. München: SH Beck Verlag.
- Schwarzer, Steve/Zeglovits. 2009. *Eva: Wissensvermittlung, politische Erfahrungen und politisches Bewusstsein als Aspekte Politischer Bildung sowie deren Bedeutung für politische Partizipation*. In: *Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 2009/3*. Wien: Facultas Verlag.
- Sutopo H.B, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif: dalam Teori Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

Yoldas, ozlem becerik. 2015. *Civic education and learning democracy: their importance for political participation of young people*. Turkey: Canakkale Onsekiz Mart University, Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Administration.